

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **2.1. Sejarah singkat Tebing Tinggi**

Daratan yang terhampar di sepanjang pinggiran sungai Padang dan sungai Bahilang itu mulai dihuni sebagai tempat tinggal pada tahun 1864. Inilah pernyataan resmi pertama kali yang dibuat oleh sejumlah tokoh masyarakat Kota Tebing Tinggi pada tahun 1987. Pernyataan ini terdapat dalam makalah berjudul “Kertas Kerja Mengenai Pokok-Pokok Pikiran Sekitar Hari Penetapan Berdirinya Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi.” Makalah ini kemudian dijadikan sebagai Perda yang menetapkan bahwa awal berdirinya Kota Tebing Tinggi adalah 1 Juli 1917.

Dalam makalah itu dipaparkan bagaimana perkembangan daerah ini pasca tahun 1864. Dimana dalam tahun-tahun itu, berdasarkan penuturan lisan yang sambung menyambung, seorang bangsawan dari Wilayah Bandar Simalungun (sekarang masuk wilayah Pagurawan ) bernama Datuk Bandar Kajum bersama pengikut setianya menyusuri sungai Padang untuk mencari hunian baru, hingga kemudian mereka mendarat dan bermukim di sekitar aliran sungai besar itu. Pemukiman itu bernama Kampung Tanjung Marulak – sekarang Kelurahan Tanjung Marulak, Kec. Rambutan.

Namun kehidupan bangsawan dari Bandar ini tidaklah tenteram, karena dia terus saja diburu oleh tentara kerajaan Raya. Maka, Datuk Bandar kajum pun memindahkan pemukimannya ke suatu lokasi yang persis berada di bibir sungai

Padang. Pemukiman itu merupakan sebuah tebing yang tinggi. Dia dan para pengikutnya mendirikan hunian di atas tebing yang tinggi itu sembari memagarinya dengan kayu yang kokoh. Pemukiman Datuk Bandar Kajum inilah yang sekarang berlokasi di Kelurahan Tebing Tinggi Lama, Kec. Padang Hilir dan kini menjadi lokasi pemakaman keturunan Datuk Bandar Kajum, kemudian yang diyakini sebagai cikal bakal nama Tebing Tinggi.

Masa itu, tentara dari Kerajaan Raya suatu kali kembali menyerang Kampung Tebing Tinggi untuk menangkap Datuk Bandar Kajum, tetapi karena tidak berada di tempat, Datuk Bandar Kajum yang bergelar Datuk Punggawa ini selamat. Sedangkan keluarganya bersama pengikutnya melarikan diri ke Perkebunan Rambutan yang saat itu di bawah kekuasaan Kolonial Belanda. Lalu dibantu oleh Belanda, Datuk Bandar Kajum pun mengadakan serangan balasan terhadap tentara Kerajaan Raya ini. Dalam peperangan itu, dia, bersama pengikutnya berhasil mengalahkan penyerang.

Setelah suasana kembali aman, untuk tetap menjaga ketentraman daerah itu, Datuk Bandar Kajum pun mengadakan perjanjian dengan Belanda. Oleh Belanda daerah kekuasaan Datuk Bandar Kajum ini dilebur menjadi wilayah taklukan Kerajaan Deli. Penanda tanganan perjanjian itu, terang kertas kerja tersebut, dilakukan Datuk Bandar Kajum dan Belanda di sebuah sampan bernama “Sagur” di sekitar muara sungai Bahilang.

Datuk Idris Hood bersama Adnan Ilyas, Drs. Mulia Sianipar, Amirullah, Kasmiran, Djunjung Siregar, Mangara Sirait, Sjahnan dan OK Siradjoel Abidin

yang membuat kertas kerja itu dan berusaha menggali historisitas berdirinya Kota Tebing Tinggi. Namun, sebagian besar tokoh itu sudah wafat, sehingga kalangan generasi muda merasa kesulitan untuk melacak akar historis daerah yang bergelar kota leumpang itu. Salah satu di antara tokoh itu yang masih hidup adalah Mangara Sirait, mantan anggota DPRD Tebing Tinggi, yang kini bermukim di belakang LP Tebing Tinggi.

Pertanyaan yang paling mendasar bagi kalangan generasi muda kota itu, saat ini adalah, apa nama daerah hunian dan tempat tinggal di sepanjang aliran sungai Padang dan sungai Bahilang itu sebelum nama ‘Tebing Tinggi’ muncul dalam data sejarah?

“Daerah itu bernama Kerajaan Padang,” tegas Amiruddin Damanik, 91, warga Desa Kuta Baru, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagei, suatu kali ketika penulis berbincang-bincang dengan dia. Jauh sebelum ada kampung Tebing Tinggi, ujarnya memulai cerita, sepanjang aliran sungai Padang dari hulu hingga hilir, daerah itu merupakan wilayah kekuasaan Kerajaan Padang.

Kerajaan ini dulunya merupakan daerah otonom di bawah Kerajaan Deli yang berpusat di Deli Tua, kata Amiruddin Damanik yang merupakan mantan penghulu pada masa penghujung berakhirnya kerajaan itu menjelang kemerdekaan Republik Indonesia. Pusat kerajaan ini, lanjut dia, berada di Kampung Bandar Sakti—sekarang Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Rambutan—yang merupakan pelabuhan sungai dan menjadi pusat perdagangan Kerajaan Padang dengan kerajaan lain. “Waktu itu sungai merupakan sarana

transportasi utama, jadi wajar kalau ibu kota Kerajaan Padang berada di tepian sungai Padang,” terang laki-laki yang terlihat masih memiliki ingatan kuat meski fisiknya sudah sepuh.

Pusat administrasi Kerajaan Padang ini berada di sebuah bangunan bergaya arsitektur Eropah yang saat ini menjadi markas Koramil 013, di Jalan KF Tandean. Bangunan itulah yang jadi saksi bisu keberadaan Kerajaan Padang, kata laki-laki yang memiliki sepuluh anak dan puluhan cucu serta cicit ini. Sedangkan istana raja lokasinya tidak berapa jauh dari pusat administrasi kerajaan. “Seingat saya, dulu istana itu masih ada di belakang panglong, bersisian dengan Jalan Dr. Kumpulan Pane dan masih terlihat dari persimpangan Jalan KF Tandean. Tapi sekarang entah ada lagi entah tidak,” tutur Amiruddin Damanik, yang mengaku sudah belasan tahun tidak ke kota (Tebing Tinggi).

Historis Kerajaan Padang ini, lanjut dia, bisa dilacak juga melalui cerita lisan yang sambung menyambung, bermula dari memerintahnya seorang penguasa bernama Raja Syah Bokar. Bersama raja ini ada juga beberapa pembantu raja yang dikenal cukup berpengaruh masa itu, mereka adalah Panglima Daud berkedudukan sebagai panglima perang dan Orang Kaya Bakir sebagai bendahara kerajaan.

Di bawah pengaruh raja ini, Kerajaan Padang memiliki daerah yang luas terdiri dari puluhan kampung dan dipimpin kepala kampung masing-masing. Tiap-tiap kampung merupakan daerah otonom tetapi tunduk pada kekuasaan raja Kerajaan Padang. Di sebelah utara, Kerajaan Padang berbatasan dengan

perkebunan Rambutan yang dikuasai Belanda. Di sebelah selatan Kerajaan Padang memiliki kampung-kampung yang menjadi batas wilayahnya dengan Kerajaan Raya, Simalungun. Kampung itu adalah Huta Padang dan Bartong –saat ini berada di Kec.Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagei. Ke arah barat, kerajaan ini mencapai Kampung Pertapaan –sekarang masuk Kec. Dolok Masihul, Sergai. Demikian pula ke arah timur, kerajaan ini memiliki batas hingga ke Bandar Khalifah—sekarang Kec. Bandar Khalifah, Sergai.

Kerajaan Padang masa itu dihuni penduduk dari multi etnis, baik etnis lokal maupun dari mancanegara. Hingga kini bukti-bukti multi etnisitas itu terlihat dari penamaan kampung-kampung yang ada di Kota Tebing Tinggi., seperti, Kampung Jawa, Kampung Begelen, Kampung Rao, Kampung Mandailing, Kampung Tempel, Kampung Batak dan Kampung Keling. Penamaan kampung yang terakhir ini berlokasi di pinggiran sungai Padang –saat ini terletak di Kelurahan Tanjung Marulak—menginformasikan bahwa pada masa Kerajaan Padang wilayah itu sudah di huni salah satu suku bangsa dari anak benua India. Bukti arkeologis keberadaan etnis anak benua India itu dengan pernah ditemukannya bangkai sebuah perahu bergaya Hindu mengendap dari kedalaman sungai Padang di Desa Kuta Baru sekira lima tahun lalu. Namun sayang, bangkai kapal itu hancur karena tidak terawat.

Demikian pula dengan keberadaan etnis Tionghoa telah ada seiring dengan perkembangan hubungan Kerajaan Padang dengan kerajaan lain. Etnis Tionghoa kala itu, banyak menghuni pinggiran muara sungai Bahilang.

Kelompok mereka dipimpin seorang kapitan. “Hingga kini kalau saya tidak salah kediaman kapitan Cina itu masih ada di Jalan Iskandar Muda berhadapan dengan bekas bioskop Metro,” tegas orang tua yang enggan di panggil kakek itu.

Di samping kedua etnis ini, orang-orang Belanda juga belakangan menghuni Kerajaan Padang . Ini dibuktikan dengan adanya perkuburan mereka yang disebut Kerkof (kuburan) di Kampung Bagelen –sekarang di Jalan Cemara. Beberapa kampung yang spesifik dari kegiatan penduduk kala itu juga masih terabadikan hingga kini, misalnya Kampung Bicara, Bandar Sono, Kampung Persiakan, Kampung Durian, Kampung Jati, Kampung Sawo, Kampung Kurnia, Kampung Jeruk, Kampung Semut, Kampung Tambangan, Kampung Sigiling dan Kampung Badak Bejuang serta beberapa kampung lainnya. Pada tahun 1887, oleh pemerintah Hindia Belanda, Tebing Tinggi ditetapkan sebagai kota pemerintahan dimana pada tahun tersebut juga dibangun perkebunan besar yang berlokasi di sekitar Kota Tebing Tinggi (*hinterland*).

Menjelang persiapan Tebing Tinggi menjadi kota otonom, maka untuk melaksanakan roda pemerintahan pada tahun 1904 didirikan sebuah Badan Pemerintahan yang bernama *Plaatselijke Fonds voor Cultuur op Soematera Timoer*.

Pada tanggal 23 Juli 1903 pemerintah Hindia Belanda menetapkan daerah Otonom Kota kecil Tebing Tinggi menjadi pemerintahan kota Tebing Tinggi sebagai daerah otonom dengan sistem desentralisasi.

Pada tahun 1910, sebelum di laksanakannya Zelf Bestuur Padang (Kerajaan Padang), maka telah dibuat titik “Pole Gruth” yaitu pusat perkembangan kota sebagai jarak ukur antara Kota Tebing Tinggi dengan kota sekitarnya. Patok Pole Gruth tersebut terletak di tengah-tengah Taman Bunga di lokasi Rumah Sakit Umum Herna. Untuk menunjang jalannya roda pemerintahan maka diadakan kutipan-kutipan berupa Cukai Pekan, Iuran penerangan dan lain-lain yang berjalan dengan baik.

Pada masa Tebing Tinggi menjadi Kota Otonom maka untuk melaksanakan Pemerintahan, selanjutnya dibentuk Badan Gementeraad Tebing Tinggi, yang beranggotakan 9 orang dengan komposisinya 5 orang Bangsa Eropa, 3 orang Bumiputera, dan 1 orang Bangsa Timur Asing. Hal ini didasarkan kepada Akte Perjanjian Pemerintah Belanda dengan Sultan Deli, bahwa dalam lingkungan Zelfbestuur didudukan orang asing Eropa dan yang dipersamakan dan ditambah dengan orang-orang Timur Asing. Pada masa itu, adanya perbedaan golongan penduduk, menyebabkan adanya perbedaan pengaturan penguasaan tanah. Untuk mengadakan pengutipan-pengutipan yang disebut setoran Retribusi dan pajak daerah, diangkatlah pada waktu itu Penghulu Pekan. Tugas Penghulu Pekan ini juga termasuk menyampaikan perintah-perintah atau kewajiban-kewajiban kepada Rakyat kota Tebing Tinggi yang masuk daerah Zelfbestuur.

Dalam perkembangan selanjutnya informasi Kota Tebing Tinggi sebagai kota Otonom dapat kita baca dari tulisan J.J.MENDELAAR, dalam “NOTA

BERTREFENDE DEGEMENTE TEBING TINGGI” yang dibuatnya sekitar bulan Juli 1930. Dalam salah satu bab dari tulisan tersebut dinyatakan bahwa setelah beberapa tahun dalam keadaan vakum mengenai perluasan pelaksanaan Desentralisasi, maka pada tanggal 1 Juli 1917 berdasarkan Desentralisasiwet berdirilah Gementee Tebing tinggi dengan Stelings Ordantie Van Statblaad 1917 yang berlaku 1 Juli 1917. **Karenanya, tanggal 1 juli inilah yang menjadi Hari jadi Kota Tebing Tinggi.**

### **Masa Pendudukan Jepang**

Pada masa pendudukan Jepang, pelaksanaan pemerintah di Tebing Tinggi tidak lagi dilaksanakan oleh Dewan Kota yang bernama Gementeerad. Pemerintah Jepang menggantikannya dengan nama Dewan Gementee Tebing Tinggi. Menjelang Proklamasi (masih pada masa Jepang) pemerintahan kota Tebing Tinggi tidak berjalan dengan baik.

Pada tanggal 20 Nopember 1945 Dewan kota disusun kembali. Dalam formasi keanggotaannya sudah mengalami kemajuan, yang para anggota Dewan Kota terdiri dari pemuka Masyarakat dan Anggota Komite Nasional Daerah.

Dewan Kota ini juga tidak berjalan lama, karena pada tanggal **13 Desember 1945** terjadilah pertempuran dengan Militer Jepang dan sampai sekarang terkenal dengan **PERISTIWA BERDARAH 13 DESEMBER 1945**, yang diperingati setiap tahun. Kemudian pada tanggal 17 Mei 1946, Gubernur



Sumatera Utara menerbitkan suatu keputusan No.103 tentang pembentukan Dewan Kota Tebing Tinggi, yang selanjutnya disempurnakan kembali dengan nama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, walaupun pada waktu itu ketua Dewan dirangkap Bupati Deli Serdang.

Ketika Agresi pertama Belanda yang dilancarkan pada tanggal 21 Juli 1947, Dewan Kota Tebing Tinggi dibekukan, demikian pula keadaan pada waktu berdirinya Negara Sumatera Timur, Kota Tebing Tinggi tidak mempunyai Dewan Kota untuk melaksanakan tugas pemerintahan.

Pada masa RIS, Dewan kota diadakan berdasarkan peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1950. Tetapi dalam proses pelaksanaannya, panitia pemilihan belum sempat menjalankan tugasnya, Peraturan Pemerintah No. 39 tersebut telah dibatalkan. Menurut undang-undang No.1 tahun 1957, pemerintah di daerah ini menganut azas Otonomi daerah yang seluasnya. Walaupun dalam undang-undang tersebut ditetapkan bahwa daerah ini berhak mempunyai DPRD yang diambil dari hasil Pemilihan Umum 1955, tetapi berdasarkan undang-undang darurat 1956 DPRD PERALIHAN kota Tebing Tinggi hanya mempunyai 10 (Sepuluh) orang anggota. Setelah keluarnya Undang-Undang No. 5 tahun 1974, tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pemerintahan di Kota Tebing Tinggi sudah relatif lebih baik dibandingkan pada masa-masa sebelumnya. Tetapi, walaupun sudah memiliki perangkat yang cukup baik, namun karena terbatasnya kemampuan daerah dalam mendukung pengadaan dalam berbagai fasilitas yang di butuhkan, roda pemerintahan di daerah ternyata masih banyak mengalami

hambatan. Pada tahun 1980 Presiden Republik Indonesia telah mengganugerakan tanda kehormatan “**PARASAMYA PURNA KARYA NUGRAHA**” kepada Kotamadya Dati II Tebing Tinggi sebagai penghargaan tertinggi atas hasil kerjanya dalam melaksanakan pembangunan Lima Tahun Kedua, sehingga dinilai telah memberikan kemampuan bagi pembangunan, demi kemajuan Negara Indonesia pada umumnya daerah khususnya.

### **Batas Kerajaan Padang**

“Sebelum sampai Sipispis, ada satu kampung bernama Bartong, itulah batas wilayah terjauh Kerajaan Padang,” tegas tokoh sepuh itu yang pernah menjadi tahanan politik di awal Orde Baru. Batas itu diperoleh Kerajaan Padang setelah memenangkan perang dengan Kerajaan Raya. “Perang itu bernama perang Lopot-Lopot, artinya perang intip-mengintip,” jelas penutur ini. Asal terjadinya perang, urai Amiruddin, bermula dari seringnya muncul gangguan yang kadang-kadang berakhir dengan pembunuhan dari orang-orang Kerajaan Raya terhadap kehidupan masyarakat di sekitar Kampung Bulian. Akibatnya, karena ketakutan penduduk Kampung Bulian ini banyak yang mengungsi hingga ke Bandar Sakti. Melihat keadaan ini, pasukan Kerajaan Padang kemudian membuat

sebuah jembatan di atas sungai Kelembah. Maksud dibuatnya jembatan ini untuk mengontrol siapa saja orang-orang yang keluar-masuk ke ibu kota kerajaan.

Ternyata, dibuatnya jembatan itu membuat Kerajaan Raya tidak senang, sehingga mereka selalu saja mengganggu ketentraman warga di Kerajaan Padang. Menghadapi keadaan tidak tentram itu, Raja Syah Bokar kemudian memerintahkan Panglima Daud untuk mengusir para pengacau itu. Maka dalam pengusiran itulah, Panglima Daud melakukan penaklukan terhadap beberapa kampung lainnya, hingga kemudian panglima Kerajaan Padang ini menghentikan pengejaran di Kampung Bartong. Lalu, kampung inilah yang dijadikan batas Kerajaan Padang.

Usai peperangan, Kerajaan Padang harus menghadapi suatu masa pancaroba dalam bentuk perebutan kekuasaan. Dalam suatu acara perburuan di Bandar Khalifah, Raja Syah Bokar karena pengkhianatan panglimanya, mati terbunuh. Lalu, sepeninggal sang raja, kekuasaan dikendalikan oleh OK Bakir. Bendaharawan kerajaan ini menjalankan pemerintahan menunggu dua anak Raja Syah Bokar yang bernama Tengku Alamsyah dan Tengku Hasyim menamatkan sekolahnya di Batavia.

Dalam catatan penutur, di saat jabatan di pangku OK Bakir inilah Kerajaan Padang kemudian takluk di bawah Kerajaan Deli yang otomatis menjadi taklukan Kolonial Belanda. Sebagai bukti ketundukan terhadap Kerajaan Deli, kerajaan induk ini kemudian mengirim salah seorang petingginya menjadi pemangku raja di Kerajaan Padang. Petinggi Kerajaan Deli itu bernama Tengku

Jalal yang kemudian menjabat sebagai raja menanti keturunan raja yang wafat pulang dari tugas belajar.

Selesai menamatkan sekolah, kedua keturunan raja ini kemudian kembali ke Kerajaan Padang untuk melanjutkan tampuk kekuasaan. Pemegang tampuk kekuasaan pertama jatuh ke tangan anak tertua yakni Tengku Alamsyah. Baru kemudian diserahkan kepada anak lainnya yakni Tengku Hasyim. Di tangan Tengku Hasyim ini, gejolak menuntut kemerdekaan terhadap Kolonial Belanda menggemuruh. Sehingga akhirnya seluruh wilayah Kerajaan Padang melebur menjadi Tebing Tinggi dengan batas-batas yang ditentukan administrasi Kolonial Belanda. Batas-batas inilah yang hingga kini menjadi patok administrasi Kota Tebing Tinggi.

Akan halnya Datuk Bandar Kajum, berdasarkan pada penuturan historis lebih awal ini, diperkirakan sebagai salah seorang pemuka masyarakat di Kerajaan Padang. Dia, mendapatkan kehormatan dari penguasa Kerajaan Padang dengan gelar Datuk Punggawa karena kesertaannya dalam perang menghadapi Kerajaan Raya. Datuk Bandar Kajum pun kemudian diberikan tanah dan wewenang untuk membangun pemukiman yang kemudian disebut Kampung Tebing Tinggi.

Lalu, dari pelacakan akar historis Kota Tebing Tinggi pada masa lalu, setidaknya harapan masyarakat Kota Tebing Tinggi untuk melakukan pemekaran wilayah, sebenarnya memiliki momentum historisitas yang bisa jadi memiliki validitas kuat. Jika menggunakan data sejarah di atas—meski merupakan data

lisan—sebenarnya wilayah Kota Tebing Tinggi sekarang ini lebih kecil dari wilayah Kerajaan Padang yang berpusat di kota itu. Ada puluhan desa dan kampung di hinterland yang dulunya merupakan wilayah Kerajaan Padang.

Namun karena keberadaan wilayah Tebing Tinggi ini hanya didasarkan pada data Kolonial Belanda, keadaannya menjadi riskan. Kota Tebing Tinggi sebagai ibu kota Kerajaan Padang harus kehilangan puluhan kampung yang dulunya merupakan bagian dari Kota Tebing Tinggi tempo doeloe itu. Sekali lagi hal ini membuktikan, ternyata penjajahan Kolonial Belanda telah merugikan Tebing Tinggi dalam soal administrasi kewilayahan. Sudah saatnya memang kita menagih kembali daerah Tebing Tinggi yang hilang berdasarkan wilayah Kerajaan Padang.

## **2.2 Letak dan Keadaan Wilayah**

### **2.2.1 Kondisi Iklim dan Letak Geografis**

Kota Tebing Tinggi berada pada posisi koordinat geografi  $03^{\circ} 16' \text{ LU} - 03^{\circ} 23' \text{ LU}$  dan  $99^{\circ} 07' \text{ BT} - 99^{\circ} 12' \text{ BT}$  ketinggian diantara 26-34 m diatas permukaan laut serta memiliki topografi mendatar dan bergelombang. Topografi mendatar memiliki kelas kemiringan lereng berkisar antara 0-2 % sedangkan topografi bergelombang berkisar antara 2-15 %. Kemiringan lereng yang relatif datar tersebut memberikan implikasi positif dalam pengembangan kegiatan ekonomi seperti kegiatan perdagangan, jasa, permukiman dan pertanian, penentuan pembangunan fisik kota, serta pengembangan sarana dan prasarana kota. Sedangkan pada kelas kemiringan lereng 0-2 % perlu mendapat perhatian

khusus akan kemungkinan banjir dikemudian hari. Hal ini perlu dicegah dengan menerapkan aturan ketat dalam penggunaan lahan dikemiringan tersebut.

Struktur geologi yang terdapat di wilayah Kota Tebing Tinggi hampir sama dengan Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Serdang Bedagai. Formasi geologi didominasi oleh kelompok alluvial dan tufa toba. Struktur geologi ini pada umumnya memiliki karakteristik tanah subur untuk pengembangan pertanian karena merupakan endapan lumpur aliran sungai, sehingga hanya berada pada kawasan datar dan cekungan sungai. Kondisi tanah ini mempunyai sifat secara umum terlihat adanya lapisan-lapisan tanah yang berulang, tidak teratur yaitu tebal lapisan, jenis bahan penyusun tanah, warna, tekstur, struktur dan kandungan bahan organik yang sering berulang (tidak beraturan), lapisan yang berbeda tapi sifat dan jenis yang sama. Keadaan morfologi wilayah Kota Tebing Tinggi didominasi oleh kelompok novair alluvium seluas 3.609,97 ha, andesit seluas 126,92 ha dan secara geologi jenis tanah yang ada potensial bagi galian “Golongan C”, seperti pasir, kerikil, tanah liat dan lainnya. Lokasi galian C berupa pasir terdapat di sekitar/sepanjang sungai yang ada. Kota Tebing Tinggi dilalui oleh beberapa sungai besar maupun sungai kecil yang pada umumnya memiliki aliran arus air menuju ke arah Utara dan Timur Laut dan bermuara ke Selat Malaka. Sungai Padang merupakan sungai utama dengan panjang sekitar  $\pm$  15,94km dan lebar  $\pm$  65 meter, Sungai Bahilang, Sungai Kelembah, dan Sungai Sibarau yang terdapat pada wilayah Kota Tebing Tinggi. Sedangkan sungai kecil lainnya yakni Sungai Sigiling dan Sungai Sibangauan.

Berdasarkan letak geografis maka Kota Tebing Tinggi dapat dikategorikan beriklim tropis dengan temperatur udara antara 25 o – 27 o C dan kondisi alam Kota Tebing Tinggi dipengaruhi oleh 2 (dua) musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan.

### **2.2.2 Batas Wilayah dan Luas Wilayah**

Kota Tebing Tinggi berada sekitar  $\pm$  78 km ke arah tenggara Kota Medan sebagai ibukota Propinsi Sumatera Utara. Wilayah administratif Kota Tebing Tinggi dikelilingi oleh beberapa perkebunan besar milik negara (BUMN) dan swasta, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara, berbatasan dengan PTPN - III Kebun Rambutan, Kabupaten Serdang Bedagai.
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan PTPN - IV Kebun Pabatu dan Perkebunan Paya Pinang, Kabupaten Serdang Bedagai.
- Sebelah Timur, berbatasan dengan PT. Socfindo Tanah Besi dan PTPN - III Kebun Rambutan, Kabupaten Serdang Bedagai.
- Sebelah Barat, berbatasan dengan PTPN - III Kebun Bandar Bejambu, Kabupaten Serdang Bedagai.

Secara administratif, wilayah Kota Tebing Tinggi sebelumnya terdiri dari 3 kecamatan yakni Kecamatan Padang Hulu, Padang Hilir dan Rambutan, namun sejak tahun 2006 melalui Perda Nomor 15 Tahun 2006 wilayahnya dimekarkan menjadi 5 Kecamatan.

Gambar di bawah ini menunjukkan posisi Kota Tebing Tinggi DI **DALAM** Kabupaten Serdang Bedagai.



Kota Tebing Tinggi di dalam Kabupaten Serdang Bedagai

## **2.3 Keadaan Penduduk**

### **2.3.1 Keadaan Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin**

Pada tahun 2011 kecamatan Tebing Tinggi memiliki kepadatan penduduk sebesar 294 Jiwa/Km<sup>2</sup> yang artinya dalam luas wilayah 1 Km<sup>2</sup> kecamatan Tebing Tinggi



terdapat 294 Jiwa/Penduduk yang menempatinnya dan wilayah cukup padat penduduknya. Kepadatan penduduk terbesar terdapat di Desa Naga Kesiangan sebesar

1.440 Jiwa/Km<sup>2</sup> dan Desa Gunung Kataran dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 1.254 Jiwa/Km<sup>2</sup>, dimana desa tersebut merupakan basis penduduk terbesar

dengan luas wilayah cukup kecil. Jumlah penduduk kecamatan Tebing Tinggi mencapai 40.616 Jiwa terdiri dari Perempuan sebesar 20.257 Jiwa dan laki – laki sebesar 20.359 Jiwa dengan tingkat Ratio Jenis Kelamin laki – laki terhadap Perempuan sebesar 99 artinya dalam 100 jiwa perempuan terdapat 99 laki – laki. Jumlah penduduk Menurut kelompok umur di kecamatan Tebing Tinggi pada tahun 2011 terbesar terdapat pada umur 0 – 4 Tahun dengan jumlah penduduk sebesar 4.361 Jiwa dan pada umur 5- 9 tahun sebesar 4.292 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terkecil terdapat pada umur 70-74 Tahun sebesar 502 dan umur 65-70 Tahun sebesar 675 Jiwa.

### **2.3.2 Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Tebing Tinggi 2010-2015**

Luas wilayah Kota Tebing Tinggi relatif kecil, yaitu hanya 0,05% dari total luas wilayah Provinsi Sumatera Utara. Tetapi masih lebih luas dibandingkan Kota Sibolga yang hanya 0,02% dari luas total Provinsi Sumatera Utara. Dibawah ini merupakan gambar tabel kepadatan penduduk pada kecamatan di Tebing Tinggi;

KECAMATAN	Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kota Tebing Tinggi (Persen)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
PADANG HULU	3.14	3.17	3.20	3.23	4.67	3.41
TEBING TINGGI KOTA	5.29	6.94	6.97	7.01	3.09	7.23
RAMBUTAN	2.63	5.36	5.41	5.45	7.90	5.78
BAJENIS	6.92	3.68	3.71	3.75	7.26	3.96
PADANG HILIR	3.64	2.65	2.67	2.70	6.64	2.84
TEBING TINGGI	3.78	3.81	3.84	3.88	6.58	4.08

## 2.4. Sarana dan Prasarana

### 2.4.1. Sarana Kesehatan

Pada prinsipnya untuk kebutuhan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kota Tebing Tinggi adalah dengan pola penyediaan sarana kesehatan dengan sistem rujukan. Sistem rujukan dalam pelayanan masyarakat ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi pembangunan pelayanan kesehatan. Potensi permasalahan yang dianggap cukup penting dalam sistem pelayanan kesehatan rujukan ini adalah tidak meratanya standar mutu atau standar pelayanan minimal dari rumah sakit rujukan.

Di Kota Tebing Tinggi terdapat 150 unit sarana kesehatan. Rumah Sakit Umum sebanyak 5 unit, yang didukung rumah sakit bersalin sebanyak 3 unit, puskesmas 9 unit, puskesmas pembantu 14 unit dan puskesmas keliling sebanyak 7 unit. Sementara itu, perkembangan praktek dokter terdapat 43 unit sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

#### **2.4.2. Sarana Ibadah**

Kondisi sosial masyarakat Kota Tebing Tinggi sejak dahulu terdiri dari berbagai etnis, sehingga membuat Kota Tebing Tinggi sebagai suatu daerah yang terdiri dari berbagai kebudayaan dan keyakinan beragama. Keyakinan beragama yang kompleks dapat dilihat dari bangunan tempat ibadah yang menyebar diseluruh penjuru Kota Tebing Tinggi. Sarana peribadatan untuk berbagai agama yang berbeda-beda ini harus dihargai mengingat agama merupakan salah satu pemersatu bangsa dalam pembangunan bidang kemasyarakatan. Perbedaan agama ini juga menunjukkan bahwa selama ini masyarakat Tebing Tinggi memiliki jiwa sosial yang tinggi. Kebebasan dalam menjalankan kehidupan beragama di Kota

Tebing Tinggi secara umum dapat dikatakan cukup baik, dimana ditemukan masih tingginya sikap saling toleransi, rasa kebersamaan, dan kekeluargaan. Jumlah rumah ibadah di Kota Tebing Tinggi pada tahun 2005 sebanyak 220 unit, yang terdiri dari mesjid (105 unit), musholla (60 unit), gereja protestan (28 unit), gereja katolik (1 unit), vihara (23 unit), dan kuil (2 unit) sebagaimana digambarkan pada tabel berikut

Pada prinsipnya pola penyebaran sarana peribadatan sebagai sarana publik adalah upaya mendekatkan kepada masyarakat sekitarnya sebagai pengguna. Tetapi untuk sarana peribadatan terdapat sarana yang dianggap sebagai sarana skala kota/regional, seperti Mesjid Raya, Vihara Utama, Gereja untuk wilayah

distrik; yang berperan pada event- event perayaan hari besar untuk masing-masing pemeluk agamanya.

Dari uraian diatas terlihat bahwa jumlah tempat peribadatan paling banyak adalah mesjid dan musholla untuk penduduk yang beragama Islam, kemudian disusul tempat peribadatan milik penduduk yang beragama Kristen Protestan.

### **2.4.3 Sarana Pendidikan**

Proses belajar mengajar tentunya harus didukung oleh fasilitas yang memadai agar transfer ilmu dapat berjalan dengan maksimal. Pada tahun 2008, sarana gedung Sekolah

Dasar (SD) sebanyak 93 unit, tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) 21 unit, dan SMU sebanyak 16 unit serta SMK Kejuruan 13 unit sebagaimana dalam tabel berikut Jumlah Fasilitas Pendidikan di Kota Tebing Tinggi Tahun 2008

## **2.5. Komunitas Batak Toba di Tebing Tinggi**

### **2.5.1 Jumlah Orang Batak di Tebing Tinggi**

Kota Tebing Tinggi merupakan salah satu kota yang didalamnya terdapat banyak suku yang mendiami didalamnya. Hampir semua suku yang umum pada kota kota lain ada di kota Tebing Tinggi. Jika ditanya jumlah orang Batak yang ada di Tebing Tinggi lebih kurang 30% masyarakat yang ada di Kota Tebing Tinggi bersuku Batak.

Adapun jumlah penduduk yang ada di Kota Tebing Tinggi menurut Badan Pusat Statistik di kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut ;

Penduduk	Kepadatan Penduduk					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Penduduk	145 248.00	146 606.00	147 771.00	149 065.00	154 804.00	156 815.00
Kepadatan Penduduk	3 778.76	3 814.09	3 884.40	3 878.06	4 027.37	4 079.68

### 2.5.2 Pekerjaan Orang Batak di Tebing Tinggi

Penduduk Tebing Tinggi yang yang bersuku batak ada di hampir semua jenis pekerjaan yang terdapat di Tebing Tinggi. Walaupun tidak sebanyak suku suku yang lain tapi suku Batak hampir ada disetiap pekerjaan yang ditemukan di Tebing Tinggi. Tapi pada umumnya mayoritas orang Batak merupakan wiraswasta atau membuka usaha seperti berdagang. Adapun orang Batak yang bukan berada di wilayah Kota Tebing Tinggi merupakan seorang petani atau membuka lahan dan memilih untuk berladang.

### 2.5.3 Perkumpulan Orang Batak di Tebing Tinggi

Sebagai makhluk sosial pasti setiap individu memiliki suatu perkumpulan baik yang mengikat anggotanya atau tidak. Perkumpulan-perkumpulan masyarakat Batak yang terdapat di Tebing Tinggi ada berbagai macam seperti ;

STM ( Serikat Tolong Menolong) yang merupakan suatu perkumpulan disuatu daerah tertentu yang bertujuan untuk membantu anggotanya jika ada yang mendapat kemalangan. Lalu ada perkumpulan dari sekelompok marga yang disebut pungan marga yang didalamnya berisikan anggota yang bermarga sama untuk tetap menjaga keharmonisan dan hubungan erat marga tersebut agar tetap terjaga. Adapula perkumpulan sektor-sektor dari Gereja yang mengadakan acara atau perkumpulan sehari dalam seminggu untuk tetap berhubungan erat antar anggota marga dalam gereja tersebut.